

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dampak dari pandemi Covid-19 secara internasional salah satunya termasuk Indonesia saat ini sedang menghadapi pada situasi yang tidak mudah terkait dengan penanganan dari dampak pandemi covid-19, usaha-usaha yang dilakukan terkait dengan upaya untuk menghindari angka kematian penduduk yang terinfeksi virus Covid-19. Strategi maupun upaya antisipasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pada awal munculnya penyebaran virus covid-19 seringkali banyak yang mempertanyakan, banyak sekali pihak yang meragukan pemerintah, karena sering kali pemerintah tidak konsisten dengan apa yang dibicarakan saat itu. Kemudian pemerintah kedatangan data masyarakat Indonesia di suatu daerah yang penyebaran virusnya tinggi atau dikatakan sebagai daerah zona merah dan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Virus Covid-19 pertama kali muncul di wuhan, China dan pertama kali mulai masuk ke Negara Indonesia sekitar akhir tahun kisaran bulan Desember tahun 2019 dan pemerintah mulai memberikan informasi tentang kasus pertama di indonesia sekitar bulan Maret tahun 2020. Penyebaran virus Covid-19 ini dalam jangka waktu yang termasuk singkat, virus ini juga dengan sangat cepat telah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia, yaitu salah satunya termasuk Indonesia. Sejumlah pengamat mengategorikan Covid-19 sebagai salah satu jenis virus yang sangat berbahaya dan sebagai virus yang sangat mematikan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkonfirmasi Covid-19. Pada 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan 2 kasus terkonfirmasi Covid-19. Sejak saat itu, jumlah pasien di Indonesia yang terinfeksi virus corona meningkat setiap hari. Hingga 13 Juli 2021, jumlah kasus yang telah terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia

telah mencapai 2.615.529 kasus terkonfirmasi dan jumlah kematian akibat Covid-19 mencapai 68.219 kasus. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus terkonfirmasi yang tertinggi di Asia Tenggara. (Kemenkes RI, 2020).

Pemerintah sudah melakukan segala cara untuk melawan pandemi Covid-19. Presiden Republik Indonesia (RI) diketahui telah membentuk tim nasional untuk meningkatkan kecepatan pengembangan vaksin Covid-19. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 3 September 2020 mengatur tentang pembentukan Kelompok Pengembangan Vaksin Covid-19 yang dipimpin oleh Menteri Perekonomian. Peran departemen penelitian dan teknologi juga melapor kepada Presiden tentang pekerjaan sehari-hari tim. Bersamaan dengan itu, pada 6 Oktober 2020, Presiden menandatangani dan mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Rencana Vaksinasi Untuk Memerangi Pandemi Covid-19. Perpres tersebut mewajibkan pemerintah menyiapkan pengadaan dan pendistribusian vaksin serta sosialisasi vaksin (Kementerian Kesehatan, 2020).

Pada 15 Desember 2021, masyarakat dikejutkan dengan pengumuman perihal temuan masalah pertama Covid-19 varian Omicron di Indonesia. “Kementerian Kesehatan telah mendeteksi seorang pasien terkonfirmasi Omicron pada tanggal 15 Desember, data-datanya telah dikonfirmasi ke GISAID serta sudah dikonfirmasi kembali dari GISAID bahwa memang data ini data sequencing Omicron” (Menteri Kesehatan, 2021). Dengan adanya virus varian baru, masyarakat dihimbau untuk melakukan Vaksin Covid-19 agar tidak terpapar virus corona.

Pada Peraturan Presiden nomor 14 Tahun 2021 perihal perubahan atas Peraturan Presiden nomor 99 Tahun 2020 perihal pengadaan vaksin serta pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penganggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019. Pada Pasal 13 A ayat (2) dikatakan bahwa setiap orang yang sudah ditetapkan menjadi sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan Kementerian Kesehatan harus mengikuti vaksinasi Covid-19. Sejalan dengan itu, Kebijakan vaksinasi Covid-19 juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan

nomor 10 tahun 2021 perihal Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dengan adanya Peraturan Presiden serta juga kebijakan berasal Kemenkes RI, maka diketahui bahwa 3 Pilar (Wali Kota Bekasi, kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi, serta Komandan Kodim 0507/Bekasi) mengeluarkan Maklumat bersama perihal percepatan Vaksinasi di Kota Bekasi. Dalam rangka peningkatan kekebalan kelompok pada warga (*Herd Immunity*) dan percepatan Vaksinasi Covid-19. Dengan demikian, masyarakat wajib mematuhi peraturan-peraturan dan juga kebijakan yang telah ditetapkan.

Vaksinasi Covid-19 dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memerangi penyebaran Covid-19. Vaksinasi Covid-19 juga bertujuan untuk menciptakan *herd immunity* di masyarakat. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri sebelum vaksinasi. Hal ini harus dilakukan agar warga mendapatkan manfaat vaksin secara optimal.

Pentingnya melakukan Vaksinasi Covid-19 menjadi upaya pencegahan Covid-19 semakin disadari serta juga dirasakan oleh rakyat Indonesia secara umum. Hal ini adalah dampak dari kebijakan pemerintah yang sudah mempersyaratkan sertifikat Vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu syarat untuk melakukan aktivitas administrasi serta perjalanan bagi rakyat Indonesia. (Kemenkes RI, 2021)

Diketahui, masih banyak warga yang menyepelekan virus corona serta tidak mengikuti protokol kesehatan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah sehingga meningkatkan resiko penularan Covid-19. Oleh sebab itu, tidak hanya perlu adanya intervensi dalam pelaksanaan mekanisme kesehatan, tetapi juga perlu segera dilakukan tindakan intervensi lain yang efektif untuk menghentikan penyebaran penyakit, yaitu melalui upaya vaksinasi (Dirjen P2P Depkes RI, 2020).

Pada pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia, pemerintah mengupayakan ketersediaan vaksin terpenuhi untuk setidaknya 208.265.720 penduduk untuk tercapainya kekebalan kelompok. Upaya-upaya pengadaan vaksin ini dilakukan melalui perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral seperti

COVAX Facility bersama GAVI serta WHO, ataupun kontribusi yang diberikan oleh negara-negara tetangga. Badan Pengawas Obat dan makanan Indonesia sudah memberikan izin penggunaan darurat pada 6 jenis vaksin COVID-19, yakni Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Novavax. Masing-masing dari jenis vaksin ini mempunyai prosedur untuk pemberiannya masing, baik dari jumlah dosis, interval pemberian, sampai platform vaksin yang berbeda-beda, yakni *inactivated* virus, berbasis RNA, *viral-vector*, dan sub-unit protein. (covid19.go.id)

Vaksin tidak hanya melindungi mereka yang memvaksinasi, namun juga masyarakat luas, mengurangi penyebaran penyakit pada populasi masyarakat. Pengembangan vaksin yang aman dan efektif sangat penting sebab diyakini bisa menghentikan penyebaran serta mencegah penyebaran penyakit pada kemudian hari. Karena virus ini juga menyebar dengan sangat cepat, maka dibutuhkan vaksinasi yang dapat diberikan pada waktu singkat untuk meminimalisir paparan virus Covid-19.

Vaksin Covid-19 adalah salah satu terobosan pemerintah dalam memerangi Covid-19 di seluruh dunia, khususnya pada negara Indonesia. Tujuan vaksinasi terhadap Covid-19 ialah untuk mengurangi penyebaran Covid-19, menurunkan angka kesakitan serta kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan serta melindungi masyarakat dari Covid-19 untuk kepentingan warga serta melindungi perekonomian. Tetapi tidak dapat dipungkiri masih banyak kelompok masyarakat yang menolak untuk divaksinasi. Kelompok penolakan vaksin memiliki beragam penyebab, mulai dari persoalan kesehatan hingga alasan kepercayaan. Terdapat beberapa kelompok masyarakat dengan pengalaman perawatan kesehatan yang tidak sesuai. Untuk kekhawatiran peningkatan kematian atau pemborosan dari vaksin. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa tubuh tidak dapat menangani vaksin dengan baik dan dapat menyerang orang yang divaksinasi, sehingga mengakibatkan penyakit serta kematian. (Kemenkes RI, CEO P2P, 2020).

Keputusan untuk melakukan vaksinasi ulang ini menimbulkan kontroversi di kalangan sebagian orang. Pertama, karena pengembangan vaksin diragukan, karena waktu pengembangan vaksin cukup singkat, kurang lebih satu tahun. Ini

berbeda dengan vaksin lain yang bisa disimpan bertahun-tahun. Hal ini kemudian meningkatkan kekhawatiran masyarakat tentang efek samping atau paparan terhadap penyedia vaksin. Sehingga persepsi serta sikap masyarakat menjadi standar kesadaran masyarakat. Sehingga persepsi serta sikap masyarakat menjadi standar kesadaran masyarakat. Perkembangan internet dan kemudahan memperoleh isu terkini mendukung volume berita. Menyebarkan isu yang salah akan mempengaruhi persepsi warga perihal vaksin Covid-19 dan juga perilaku mereka. Keputusan dirancang sebagian besar sesuai berita yang diperoleh dari internet, terutama dari media sosial (Moudy dan Syakurah, 2020).

Ada beberapa persetujuan berkaitan dengan Partisipasi masyarakat dalam program vaksin covid-19. Awal permasalahan terkait wabah covid-19 yang terus meningkat tersebut salah satunya karena kurang optimalnya vaksinasi di beberapa wilayah. Dengan partisipasi masyarakat pada program vaksin mempunyai dampak yang besar pada suatu pembangunan di wilayah. Seperti yang diketahui berhasil atau tidaknya pembangunan pada suatu daerah ditinjau dari bagaimana masyarakatnya berpartisipasi pada program yang dirancang oleh pemerintah ataupun pihak-pihak terkait yang bersangkutan dalam upaya terselenggaranya pembangunan dengan baik pada suatu daerah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak Kelurahan Sumur Batu mengenai informasi yang didapat terkait warga yang tidak mau untuk divaksin dikarenakan adanya unsur budaya yang masih melekat pada masyarakat sehingga masyarakat tersebut menolak untuk divaksinasi. Berikut merupakan hasil wawancaranya bersama Bapak Arif Kelurahan Sumur Batu:

“Disini terdapat sekelompok masyarakat yang tidak ingin divaksin, itu tepatnya ada di RT02 RW02 Kelurahan Sumur Batu, yang saya denger ya mereka itu gamau divaksin karena kultur budaya yang mereka anut masih ketat, kuat, masih melekat pada diri masing-masing. Agama yang mereka anut juga masih islam yang seperti baduy, jadi teknologi itu jarang, seperti speaker juga engga, tv juga gak ada, masih islam yang jaman dulu. Mereka benerbener harus pake sarung, bercadar, jadi mereka punya keyakinan sendiri untuk tidak divaksin, mereka yakin bahwa diri mereka kuat tanpa melakukan vaksin.”

Dari wawancara tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui alasan masyarakat dalam mengikuti kegiatan vaksinasi covid-19. Adapun hal yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam keikutsertaan vaksin Covid-19 yaitu adanya berita hoaks tentang vaksin Covid-19 di Indonesia. Dengan adanya berita hoax ini, masyarakat belum ingin bahkan masih enggan untuk melakukan vaksin Covid-19. Dikarenakan masyarakat mendapatkan berita hoax paling banyak melalui Media Sosial. Media Sosial adalah suatu platform untuk berhubungan dengan orang lain, termasuk dalam hal penyebaran berita terkini ataupun berita hoaks. Dengan adanya kehadiran vaksin Covid-19 di Indonesia, masyarakat mendengar atau bahkan mendapatkan informasi tentang isu-isu hoaks yang berujung menjadi berita simpang siur. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk tidak langsung menerima berita yang beredar diluar sana.

Berikut contoh beberapa berita hoaks yang beredar di Media Sosial yang dibahas oleh Kompas.com yang diakses pada 21 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

1. [HOAKS] Vaksinasi Berujung Memasukkan Mikrochip 666 ke Tubuh Manusia
2. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Meningkatkan HIV, Vaksin Cacar Memicu AIDS
3. [HOAKS] Vaksin adalah Cairan Beracun
4. [HOAKS] Vaksin Covid-19 Menyebabkan Hepatitis Akut pada Anak
5. [HOAKS] Vaksin Sebabkan Lambat Berpikir, Sensitif, dan Agresif

Berdasarkan beberapa contoh berita hoaks di atas, justru dapat mengakibatkan banyak sekali macam persepsi masyarakat serta pemikiran negatif masyarakat perihal adanya vaksin covid-19. Pemikiran negatif masyarakat dalam mengikuti vaksinasi ini mampu menjadi penghambat pada pelaksanaan vaksinasi. Dengan adanya isu yang tersebar pada media sosial, hal ini menjadi tolak ukur mengapa masyarakat tidak mau melakukan vaksinasi. Sebab yang kita ketahui, penikmat media sosial pada kalangan masyarakat khususnya pada Kecamatan Bantargebang itu cukup banyak, dan hal tersebut dapat berpengaruh di masyarakat untuk tidak melakukan vaksin. Isu-isu hoaks tersebut menyebar ke berbagai media

sosial seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kemudahan dalam mengakses media sosial menghasilkan informasi atau berita tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dampak lain dari berbagai macam berita hoaks tentang vaksinasi Covid-19 yaitu membuat masyarakat semakin meragukan dan masyarakat takut bahkan menolak untuk divaksin, dan banyak pula masyarakat yang menanyakan apakah pemberian vaksin itu hak atau kewajiban. Jika berbicara tentang hak, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan HAM adalah seperangkat hak yang sudah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati dan dijunjung tinggi oleh Negara, Hukum, dan Pemerintah.

Pada prinsipnya masyarakat berhak atas kesehatan dan juga berkewajiban untuk melaksanakan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah sendiri bertanggung jawab untuk merencanakan, menyelenggarakan, mengelola, mendorong, dan mengendalikan pelaksanaan upaya kesehatan yang adil dan dapat diakses oleh masyarakat, yang diatur dalam Pasal 14(1) Undang-Undang Kesehatan No. 36. 2009. Selain itu, Pasal 152(1) Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009. Pemerintah, kotamadya dan kotamadya bertanggung jawab atas pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan akibatnya.

Jelas dari pasal ini bahwa negara dan masyarakat bertanggung jawab dalam pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dan akibatnya. Jadi pada dasarnya vaksinasi bukan hanya masalah kesehatan pribadi, tetapi lebih kepada pencegahan infeksi dan membangun perlindungan kekebalan tubuh setiap orang, karena kehidupan bermasyarakat pada dasarnya menyelamatkan tidak hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain yang membutuhkan perlindungan.

Oleh karena itu, vaksinasi adalah tugas negara untuk memberikan hak kepada warga negaranya untuk tetap sehat dan aman dari kemungkinan infeksi virus

dan, pada prinsipnya, tidak semua orang dapat menolak vaksinasi, karena siapa pun yang menolak vaksinasi juga memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan orang hak orang lain.

Pasal 69(1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, moral, etika, dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara orang lain. Kemudian Pasal 69(2) mengatakan: Setiap hak asasi manusia menimbulkan tugas dan kewajiban mendasar untuk membalas hak-hak dasar orang lain, dan merupakan tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, memupuk, dan memajukannya.

Untuk memperkuat permasalahan dari penelitian ini, peneliti mendapatkan data untuk memperkuat masalah yang diteliti yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**

**Capaian Vaksinasi di Kota Bekasi Pada Tanggal 30 Juni 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Total Tervaksin (30 Juni 2022)					
			Dosis I	%	Dosis II	%	Dosis III	%
1	Bekasi Utara	339,083	131.591	38,80%	125.640	37,05%	42.470	12,52%
2	Medan Satria	163,047	99.893	61.26%	91.942	56,39%	46.833	28,72%
3	Bekasi Selatan	212,057	151.898	71,63%	160.102	75,50%	79.235	37,36%
4	Bekasi Barat	284,004	114.603	40,35%	108.194	38,09%	36.054	12,69%
5	Rawa Lumbu	222,054	101.799	45,84%	97.045	43,70%	29.215	13,15%
6	Bekasi Timur	259,017	155.612	60,07%	147.859	57,08%	43.080	16,63%
7	Mustika Jaya	215,030	107.123	49,81%	106.191	49,38%	31.736	14,75%



8	Bantargebang	108,011	61.814	57,22%	62.106	57,49%	25.842	23,92%
9	Jati Asih	249,043	100.066	40,18%	98.204	39,43%	40.151	16,12%
10	Jati Sampurna	124,096	76.009	61,25%	69.385	55,91%	22.446	18,08%
11	Pondok Melati	132,022	57.428	43,49%	56.335	42,67%	17.099	12,95%
12	Pondok Gede	253,030	100.939	39,89%	91.627	36,21%	29.452	11,64%
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>2.560.494</b>	<b>1.258.775</b>	<b>49,16%</b>	<b>1.214.630</b>	<b>47,43%</b>	<b>443.613</b>	<b>17,32%</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, dan diolah peneliti pada 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi per tanggal 30 Juni 2022 masih terdapat jumlah vaksinasi Dosis I, II, dan III, masih belum optimal 100%. Yang mana seharusnya vaksinasi covid-19 ini diwajibkan bagi seluruh masyarakat agar tidak mudah terjangkit virus corona yang dapat mematikan.

Oleh karena itu, peneliti akan membahas tentang Partisipasi Masyarakat di wilayah Kecamatan yang pencapaian vaksinnya masih tergolong rendah. Wilayah yang diambil untuk penelitian lebih lanjut yaitu wilayah Kecamatan Bantargebang, dikarenakan wilayah Kecamatan Bantargebang lebih mudah dijangkau oleh peneliti. Letak wilayah Kecamatan Bantargebang dari Pusat Kota dan Pemerintahan Kota Bekasi lebih Strategis.

Adapun data kepadatan penduduk di Kecamatan Bantargebang berdasarkan BPS kota Bekasi sebagai berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Data Penduduk Kecamatan Bantargebang Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
<b>1</b>	Bantargebang	33.497
<b>2</b>	Cikiwul	28.056
<b>3</b>	Sumur Batu	23.793
<b>4</b>	Ciketing Udik	24.117
<b>Jumlah</b>		<b>109.443</b>

Sumber: Kecamatan Bantargebang, 19 September 2022.

Berdasarkan jumlah penduduk yang diperoleh peneliti langsung dari Kecamatan Bantargebang, kepadatan di Kecamatan Bantargebang mencapai 109.443 penduduk. Paling tinggi kepadatan penduduknya yaitu di Kelurahan Bantargebang mencapai sebanyak 33.497 penduduk, diikuti dengan Kelurahan Cikiwul yang mencapai 28.056 penduduk, dan yang ketiga disusul Kelurahan Sumur Batu yang mencapai 23.793 penduduk. Dan yang terakhir adalah dari Kelurahan Ciketing Udik yang mencapai 24.117 penduduk. Data penduduk di Kecamatan Bantargebang yang diperoleh peneliti adalah data penduduk tahun 2022.

Kepadatan penduduk juga berpengaruh dalam kasus Covid-19, dalam hal ini diukur dari jumlah kasus. Kepadatan penduduk berperan dalam pertumbuhan Covid-19 karena sebanding dengan laju kontak. Kepadatan penduduk perkotaan memberikan peluang lebih besar dalam penyebaran Covid-19 jika tidak dilakukannya pembatasan sosial.

Adapun data Angka kasus kejadian Covid-19 di Kota Bekasi dipertengahan bulan Juli adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 3**  
**Angka Kejadian Kasus Covid-19 di Kecamatan Bantargebang**

<b>Total Kejadian Kasus Covid</b>						
<b>No.</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Kontak Erat</b>	<b>Suspek</b>	<b>Probable</b>	<b>Terkonfirmasi</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Bantargebang	1.441	242	14	997	2.694
<b>2</b>	Cikiwul	764	151	18	689	1.622
<b>3</b>	Sumur Batu	1.518	205	18	1137	2.878
<b>4</b>	Ciketing Udik	1.239	137	9	657	2.042
<b>Total Keseluruhan</b>						<b>9.236</b>

Sumber: <https://corona.bekasikota.go.id>. Diakses pada 16 Juli 2022.

**Keterangan:**

Kontak Erat : Seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19.

Suspek : Seseorang dengan keluhan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

Probable : Seseorang dengan kasus suspek dengan infeksi saluran pernafasan berat/meninggal dengan gambaran klinis.

Terkonfirmasi : Seseorang yang dinyatakan positif covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di *website* Corona Bekasi Kota, terdapat angka kejadian kasus covid-19 di Kota Bekasi khususnya di wilayah Kecamatan Bantargebang. Total kasus yang terjadi telah mencapai 9.236 jiwa. Dampak dari virus corona untuk masyarakat Kecamatan Bantargebang tentunya sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan masyarakat sulit untuk berinteraksi dengan tetangga, sulit untuk mencari pekerjaan, bahkan tidak dapat melakukan aktivitas pada umumnya. Hal ini telah diuraikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

**Tabel 1. 4**  
**Capaian vaksinasi di Wilayah Kecamatan Bantargebang**  
**Per 30 Juni 2022**

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Dosis 1	%	Dosis 2	%	Dosis 3	%
1	Bantargebang	33.477	34.685	56,36%	36.532	59,36%	13.984	22,72%
2	Cikiwul	28.056						
3	Sumur Batu	24.117	13.001	53,90%	13.476	55,87%	5.599	23,21%
4	Ciketing Udik	23.793	14.128	59,37%	12.098	50,84%	6.259	26,30%
	<b>Jumlah</b>	<b>109.443</b>	<b>61.814</b>	<b>56,48%</b>	<b>62.106</b>	<b>56,74%</b>	<b>25.842</b>	<b>23,61%</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan diolah peneliti pada tahun 2022

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti mengenai pencapaian vaksinasi covid-19 di Kecamatan Bantargebang, pencapaian vaksinasi per tanggal 30 juni 2022 ini diketahui bahwa belum optimal 100%, dengan hal ini peneliti ingin mencari tahu bagaimana partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan vaksinasi

covdi-19. Ingin mengetahui hal apa saja yang menjadi faktor dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat Kelancaran dan keberhasilan vaksinasi Covid-19 hanya bisa terjadi jika semua elemen masyarakat bekerja sama. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti organisasi sosial, lembaga negara, otoritas, dan lainnya. Untuk menyelenggarakan vaksinasi terhadap Covid-19. Seluruh masyarakat dapat mendukung vaksinasi Covid-19 dengan menghadiri vaksinasi di Puskesmas terdekat. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan aman dan berkualitas tinggi karena telah melalui uji klinis yang ketat. (Kemenkes RI, 2021)

Pemerintah juga meminta warga untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih selama 20 detik, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari keramaian dan membatasi mobilitas, bahkan setelah menerima vaksin. Dengan vaksinasi, kesehatan membaik, ekonomi membaik. (Kemenkes RI).

Dengan demikian dari penjelasan yang sudah peneliti jabarkan, peneliti akan mengangkat judul “Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Keikutsertaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi” Studi dilakukan di Wilayah Kecamatan Bantargebang agar peneliti dapat melihat langsung bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti vaksin covid-19. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam mengatasi permasalahan dalam program vaksin Covid-19 sehingga hasil penelitian membawa dampak positif bagi masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah diatas, peneliti tertarik untuk memfokuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Kecamatan Bantargebang dalam keikutsertaan Vaksin Covid-19?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Masyarakat Kecamatan Bantargebang dalam keikutsertaan Vaksin Covid-19?

3. Strategi atau upaya apakah yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan vaksin covid-19?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Keikutsertaan Vaksin Covid-19 di Kecamatan Bantargebang.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Masyarakat dalam keikutsertaan vaksin Covid-19?
3. Mengetahui strategi atau upaya apakah yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan vaksin covid-19?

### **1.4 Signifikasi Penelitian**

Signifikasi penelitian berisi tentang manfaat penelitian. Signifikasi Penelitian terbagi menjadi dua yaitu, signifikasi akademik dan signifikasi praktis. Antara lain:

#### **1.4.1 Signifikasi Akademik**

Berdasarkan permasalahan tentang “Partisipasi Masyarakat dalam keikutsertaan Vaksinasi Covid-19 pada Kecamatan Bantargebang” diharapkan penelitian ini berjalan dengan lancar. Selain itu adanya hasil studi terdahulu yang dijadikan sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam memperkaya referensi penulis menyajikan beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Meiherayenti et al. (2022) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kampar”, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa banyak masyarakat khususnya di Kabupaten Kampar yang tidak merespon positif vaksin Covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus deskriptif. Penggunaan metode dan pendekatan tersebut sesuai

dengan tujuan utama penelitian yaitu mempelajari, mendeskripsikan dan menganalisis data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sendiri. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mau menjadi relawan vaksinasi Covid-19, yang ingin mengikuti vaksinasi Covid-19 karena kepentingan administratif yang memerlukan bukti vaksinasi Covid-19 melalui vaksinasi dan juga karena alasan lain yang tidak sukarela dan kepercayaan diri sosial.

2. Irssa Intan Fatiha et al. (2021) yang berjudul “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Vaksinasi Covid-19 Oleh Lembaga Pemerintah di Desa Latukan Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di Desa Latukan kab. Lamongan pada program vaksinasi dan hasil penelitian ini yaitu tidak adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat umum mengenai pentingnya vaksinasi, namun terdapat penyuluhan dari rumah ke rumah oleh pihak bidan desa kepada para lansia, dan adanya berita hoax mengenai dampak melakukan vaksinasi. Metode yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara dan studi literatur.

3. Alfaina Wahyuni et al. (2021) yang berjudul “Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Penularan Covid-19 dan Optimalisasi Adaptasi Kebiasaan Baru”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang terjadi dari partisipasi masyarakat dalam pencegahan covid-19 dan hasil penelitian ini diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya mematuhi protocol Kesehatan selama adaptasi kehidupan baru dimasa pandemi covid-19 melalui optimalisasi pemberdayaan kader kesehatan dan masyarakat relawan.

4. Siti Arafah Siregar et al. (2022) yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Pasar Gunungtua Kabupaten Padang Lawas Utara”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam pencegahan Covid-19 di Kelurahan Pasar Gunungtua Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Hasil dari penelitian ini adalah variable dominan yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam

pengecegan Covid-19 adalah Kesempatan, Kemauan, Kemampuan, dan Peran Kader atau Tenaga Kesehatan.

5. Emiron Wanimbo et al. (2021) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Memutuskan Mata Rantai Pandemi Covid-19 di Kelurahan Tingkuluh Kecamatan Wanea Kota Manado”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam memutuskan mata rantai pandemic covid-19 di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitian ini bahwa Kesadaran masyarakat dan partisipasi spontan dari masyarakat untuk memutuskan mata rantai pandemi covid-19, 90 persen warga masyarakat Kelurahan Tingkulu sudah melakukan dengan mengikuti protokol kesehatan terhadap memutus mata rantai pandemi covid-19, sesuai menghimbau dari pemerintah pusat dan daerah lebih khususnya kelurahan Tingkulu, sedangkan 10 persen belum melakukan protokol kesehatan, kendala-kendala yang dialami protokol kesehatan adalah kesadaran dan partisipasi masyarakat, perekonomian, di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado.

6. Ultri Rahma Yanti et al. (2022) yang berjudul “Strategi Pemerintahan Nagari dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Vaksinasi Covid-19 di Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung”, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi Pemerintahan Nagari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program vaksinasi Covid-19 di Nagari Pamuatan. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari *Dusseldorp*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informan berjumlah 12 orang. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat strategi yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Pamuatan dalam mensukseskan program vaksinasi Covid-19, diantaranya yaitu, persamaan persepsi antar aparaturn Pemerintahan Nagari, kolaborasi dengan dinas kesehataan dan



lembaga kepolisian, sinergi yang dipakai dengan lembaga adat dan agama, serta sosialisasi vaksinasi Covid-19.

7. Ade Putri Avilia et al. (2022) yang berjudul “Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Covid-19 berhubungan dengan Partisipasi Vaksinasi Covid-19”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hubungan Pengetahuan WUS Tentang Covid-19 Terhadap Partisipasi Dalam Melakukan Vaksinasi Covid-19 di Wilayah Kerja Puskesmas Pangkalan Kasai tahun 2022. Metode penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan *Cross sectional* dan pengambilan sampel dengan metode *Snowball sampling*. Hasil menunjukkan terdapat hubungan antara pengetahuan WUS tentang Covid-19 dengan partisipasi dalam melakukan vaksinasi Covid-19. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengetahuan WUS tentang Covid-19 dapat meningkatkan partisipasi WUS dalam melakukan vaksinasi Covid-19.

8. Andi Heru Susanto et al. (2020) yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengurangan Penyebaran Virus Covid-19”, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus covid 19 dengan menggunakan metode kuantitatif serta analisis structural equation model (SEM). Jumlah populasi sebanyak 150 orang dengan metode metadata non probability sampling serta melakukan observasi selama 60 hari (2 bulan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan Partisipasi Masyarakat yang tinggi dan pengambilan Kebijakan Pemerintah yang tepat dapat mengurangi penyebaran virus covid 19 di Indonesia.

9. Yudan Hermawan et al. (2020) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan Covid-19 di Desa Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul. Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan adalah teknik ketekunan pengamatan lapangan, triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan model interaktif, yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yaitu tahapan

partisipasi masyarakat dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil.

10. Tawakkal Baharuddin et al. (2022) yang berjudul “Partisipasi dan kepercayaan sosial daring: kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana narasi, partisipasi dan tingkat kepercayaan sosial terhadap kebijakan vaksinasi di jejaring sosial berbasis daring (online). Jejaring sosial berbasis daring seperti Twitter, merupakan media yang cukup dominan digunakan selama pandemi. Adapun penggunaan perangkat lunak analisis Nvivo 12 Plus sebagai metode yang dipilih untuk memaksimalkan hasil pengodean data dari sumber data Twitter. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis isi deskriptif. Analisis isi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan pada isi komunikasi (Ahmad, 2018). Hasil studi menunjukkan bahwa kepercayaan sosial yang rendah dapat menghambat kebijakan vaksinasi di Indonesia. Situasi ini ikut memengaruhi minat kolektif dan sikap kooperatif masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam mereduksi jumlah kasus infeksi COVID-19.

**Tabel 1. 5**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meiherayenti et al. (2022)	Partisipasi Masyarakat dalam Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kampar	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Masih banyak diantara masyarakat kabupaten Kampar tidak merepon secara baik adanya vaksinasi covid-19.
2	Irssa Intan Fatiha et al. (2021)	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Vaksinasi Covid-19 Oleh		Tidak adanya sosialisasi dan penyuluhan dari rumah kerumaholehpihak

		Lembaga Pemerintah di Desa Latukan Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan	Penelitian Kualitatif Deskriptif	bidan desa kepada para lansia, dan adanya berita hoaks mengenai dampak melakukan vaksinasi.
3	Alfaina Wahyuni et al. (2021)	Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Penularan Covid-19 dan Optimalisasi Adaptasi Kebiasaan Baru	Penelitian kualitatif	Mengetahui masalah yang terjadi dari partisipasi masyarakat dalam pencegahan covid-19 dan diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya mematuhi protokol kesehatan.
4	Siti Arafah Siregar et al. (2022)	Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Pasar Gunungtua Kabupaten Padang Lawas Utara	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Terdapat variabel dominan yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pencegahan covid-19 adalah kesempatan, kemauan, kemampuan, dan peran kader atau tenaga kesehatan.
5	Emiron Wanimbo et al. (2021)	Partipasi Masyarakat dalam Memutuskan Mata Rantai Pandemi Covid-19 di		Kesadaran masyarakat dan partisipasi spontan dari masyarakat untuk memutuskan mata rantai pandemic covid-

		Kelurahan Tingkuluh Kecamatan Wanea Kota Manado	Penelitian Kualitatif Deskriptif	19, 90% warga masyarakat kelurahan tingkulu sudah melakukan dengan mengikuti protokol kesehatan dalam memutus mata rantai pandemic covid-19.
6	Ultri Rahma Yanti et al. (2022)	Strategi Pemerintahan Nagari dalam Meningkatan Partisipasi Masyarakat pada Program Vaksinasi Covid-19 di Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung	Penelitian Kualitatif tipe studi kasus	Terdapat 4 (empat) strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari Pamuan dalam mensukseskan program vaksinasi covid-19, diantaranya yaitu: persamaan persepsi antar aparatur pemerintahan Nagari, Kolaborasi dengan dinas kesehatan dan Lembaga kepolisian, sinergi yang dipakai dengan Lembaga adat dan agama, serta sosialisasi vaksinasi covid-19.
7	Ade Putri Avilia et al. (2020)	Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Covid-19 berhubungan	Penelitian Kualitatif	Terdapat hubungan antara pengetahuan WUS tentang covid-19 dengan partisipasi

		dengan Partisipasi Vaksinasi Covid-19		dalam melakukan vaksinasi covid-19.
8	Andi Heru Susanto et al. (2020)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengurangan Penyebaran Virus Covid-19	Penelitian Kuantitatif	Partisipasi masyarakat yang tinggi dan pengambilan kebijakan pemerintahan yang tepat dapat mengurangi penyebaran virus covid-19 di Indonesia.
9	Yudan Hermawan et al. (2020)	Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Terdapat 4 (empat) tahapan dan bentuk partisipasi dalam pencegahan covid-19 di desa Bejiharjo, Kurangmojo, Gunung Kidul
10	Tawakkal Baharuddin et al. (2022)	Partisipasi dan kepercayaan sosial daring: kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia	Penelitian Kuantitatif	Kepercayaan sosial yang rendah dapat menghambat kebijakan vaksinasi di Indonesia. Situasi ini dapat mempengaruhi minat kolektif dan sikap kooperatif masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam mereduksi

				jumlah kasus infeksi covid-19.
--	--	--	--	--------------------------------

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu, penelitian ini merupakan pertama di Kota Bekasi yang membahas terkait Partisipasi Masyarakat Kecamatan Bantargebang dalam keikutsertaan Vaksinasi Covid-19. Dalam penelitian ini tidak hanya membahas terkait keikutsertaan masyarakat dalam melakukan vaksin saja, tetapi juga membahas terkait apa saja yang mempengaruhi masyarakat Bantargebang dalam berpartisipasi untuk melakukan vaksinasi Covid-19.

#### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Penelitian ini, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Di samping itu, untuk Program Studi Ilmu pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang Partisipasi Masyarakat Kecamatan Bantargebang dalam keikutsertaan Vaksinasi Covid-19.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi lima BAB, antara lain:

1. BAB I, berisikan pendahuluan. Penulis menguraikan latar belakang bagaimana masalah itu terjadi, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II, berisikan tentang Kerangka Teori yaitu, bab yang menguraikan tentang kajian pustaka bersumber dari buku-buku, internet, dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.
3. BAB III, berisikan tentang metodologi penelitian yaitu paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik

pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.

4. BAB IV, Pembahasan. Berisikan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.
5. BAB V, Penutup. Bab yang berisikan simpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.

